

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SOSIAL DI MASYARAKAT MARGINAL: STUDI LITERATUR TENTANG HAMBATAN DAN STRATEGI ADAPTASI

Ni Made Hintya Mahayani

Universitas Bali Internasional

Email Korespondensi: hintyamahayani@iikmpbali.ac.id

ABSTRACT

This research examines the implementation of social policies in marginalized communities, the obstacles they face, and the adaptation strategies they employ. The analysis is conducted through a literature review of various relevant previous studies. The research findings indicate that marginalized communities face diverse obstacles in accessing and utilizing social policy programs, including structural obstacles such as geographical accessibility, infrastructure, and bureaucracy; cultural obstacles such as social stigma, discrimination, and understanding; and individual obstacles such as education level, economic status, and disability. However, they also demonstrate significant adaptive capacity through individual and collective strategies, such as strengthening social networks, cross-sectoral collaboration, education and capacity building, and climate change mitigation and adaptation. This study concludes the importance of a comprehensive and participatory approach in the design and implementation of social policies that are responsive to the specific needs of marginalized communities, as well as the need for synergy and coordination among stakeholders. Policy recommendations include enhancing social capital, food security, education and training, climate change adaptation, evaluation of social protection programs, and infrastructure strengthening.

Keywords: Marginalized Communities, Social Policy, Adaptation Strategy, Social Resilience, Social Protection

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan sosial di masyarakat marginal, hambatan yang dihadapi, dan strategi adaptasi yang mereka terapkan. Analisis dilakukan melalui studi literatur terhadap berbagai penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat marginal menghadapi beragam hambatan dalam mengakses dan memanfaatkan program-program kebijakan sosial, antara lain hambatan struktural seperti aksesibilitas geografis, infrastruktur, dan birokrasi; hambatan kultural seperti stigma sosial, diskriminasi, dan pemahaman; serta hambatan individual seperti tingkat pendidikan, ekonomi, dan disabilitas. Namun, mereka juga menunjukkan kemampuan adaptasi yang signifikan melalui strategi individual dan kolektif, seperti penguatan jaringan sosial, kolaborasi lintas sektor, pendidikan dan peningkatan kapasitas, serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Studi ini menyimpulkan pentingnya pendekatan komprehensif dan partisipatif dalam perancangan dan implementasi kebijakan sosial yang responsif terhadap kebutuhan spesifik masyarakat marginal, serta perlunya sinergi dan koordinasi antar pemangku kepentingan. Rekomendasi kebijakan meliputi peningkatan modal sosial, ketahanan pangan, pendidikan dan pelatihan, adaptasi perubahan iklim, evaluasi program perlindungan sosial, dan penguatan infrastruktur.

Kata kunci: Masyarakat Marginal, Kebijakan Sosial, Strategi Adaptasi, Ketahanan Sosial, Perlindungan Sosial

PENDAHULUAN

Kebijakan sosial merupakan instrumen penting bagi pemerintah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini dirancang untuk melindungi kelompok rentan, mengurangi kesenjangan sosial, dan meningkatkan kualitas hidup seluruh warga negara. Implementasi kebijakan sosial yang efektif menjadi krusial, terutama bagi masyarakat marginal yang seringkali menghadapi

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



berbagai hambatan dalam mengakses layanan dan program pemerintah(Handayani & Aliyudin, 2023). Masyarakat marginal, seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, masyarakat terpencil, dan kelompok minoritas, kerap kali terpinggirkan dan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka(Ndaumanu, 2020). Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai implementasi kebijakan sosial di masyarakat marginal, termasuk hambatan yang dihadapi dan strategi adaptasi yang mereka terapkan, sangatlah penting. Berbagai faktor dapat menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan sosial di masyarakat marginal. Faktor-faktor tersebut dapat berupa hambatan struktural, seperti kurangnya infrastruktur dan aksesibilitas layanan, serta hambatan kultural, seperti stigma dan diskriminasi. Selain itu, hambatan individual, seperti tingkat pendidikan dan kemampuan adaptasi individu, juga dapat mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan sosial(Wijayanti et al., 2022)(Bagus, 2019). Studi ini akan mengelaborasi lebih lanjut mengenai berbagai jenis hambatan tersebut dan bagaimana hambatan tersebut mempengaruhi akses masyarakat marginal terhadap program-program kebijakan sosial.

Masyarakat marginal seringkali mengembangkan strategi adaptasi untuk mengatasi hambatan yang mereka hadapi dalam mengakses layanan dan program pemerintah. Strategi adaptasi tersebut dapat berupa strategi individual, seperti mencari pekerjaan informal atau mengandalkan jaringan sosial, maupun strategi kolektif, seperti membentuk kelompok swadaya masyarakat atau melakukan advokasi kebijakan(Asror, 2021). Studi ini akan mengkaji berbagai strategi adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat marginal dan menganalisis efektivitas strategi tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Studi literatur ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kebijakan sosial di masyarakat marginal. Fokus utama studi ini adalah untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh masyarakat marginal dalam mengakses dan memanfaatkan program-program kebijakan sosial. Selain itu, studi ini juga akan menganalisis strategi adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat marginal dalam menghadapi hambatan tersebut. Dengan memahami hambatan dan strategi adaptasi, diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi perbaikan implementasi kebijakan sosial di masa mendatang. Penelitian ini penting karena dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan sosial yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat marginal.

Melalui studi literatur ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi kebijakan sosial di masyarakat marginal. Hasil studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para pembuat kebijakan, praktisi, dan akademisi dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan sosial yang lebih efektif dan berpihak pada masyarakat marginal. Dengan demikian, kebijakan sosial dapat menjadi instrumen yang ampuh dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

METODE

Studi literatur ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis berbagai sumber pustaka yang relevan. Sumber data primer meliputi jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dokumen kebijakan, dan publikasi resmi pemerintah terkait implementasi kebijakan sosial dan masyarakat marginal. Pencarian literatur dilakukan melalui database akademik seperti JSTOR, Google Scholar, ProQuest, dan ScienceDirect, menggunakan kata kunci seperti "kebijakan sosial", "masyarakat marginal", "implementasi kebijakan", "hambatan kebijakan", "strategi adaptasi", "kemiskinan", "disabilitas", "masyarakat terpencil", dan "kelompok minoritas". Selain itu, studi ini juga akan memanfaatkan sumber data sekunder seperti artikel berita, laporan LSM, dan data statistik dari lembaga resmi untuk memperkaya analisis dan memberikan konteks yang lebih luas. Proses seleksi sumber pustaka dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan relevansi, kredibilitas, dan kualitas metodologi penelitian yang digunakan. Sumber-sumber yang dipilih akan dianalisis secara kritis untuk mengidentifikasi tema-tema kunci, pola, dan tren yang berkaitan dengan implementasi kebijakan sosial di masyarakat marginal, hambatan yang dihadapi, serta strategi adaptasi yang mereka terapkan.

Analisis data dilakukan secara tematik dengan mengidentifikasi tema-tema kunci yang muncul dari sumber pustaka yang telah dikumpulkan. Data yang terkumpul akan dikelompokkan berdasarkan tema-tema tersebut untuk memudahkan proses analisis dan interpretasi. Selanjutnya, data akan dianalisis

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



secara deskriptif untuk menggambarkan gambaran umum mengenai implementasi kebijakan sosial di masyarakat marginal, hambatan yang dihadapi, dan strategi adaptasi yang mereka lakukan. Analisis juga akan mencakup perbandingan antara berbagai studi dan perspektif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Hasil analisis akan disajikan secara sistematis dan terstruktur, disertai dengan kutipan dan referensi yang jelas untuk menjamin validitas dan reliabilitas studi. Studi ini juga akan mempertimbangkan keterbatasan-keterbatasan yang ada, seperti ketersediaan data dan potensi bias dalam pemilihan sumber pustaka, untuk memastikan objektivitas dan kehati-hatian dalam menginterpretasikan hasil penelitian.

PEMBAHASAN

1. Hambatan Implementasi Kebijakan Sosial di Masyarakat Marginal

Implementasi kebijakan sosial di masyarakat marginal di Indonesia sering kali menghadapi berbagai hambatan yang signifikan. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan sosial adalah partisipasi masyarakat. Menurut Riyanto, partisipasi aktif masyarakat sangat penting untuk meningkatkan efektivitas program-program sosial pemerintah. Namun, terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan partisipasi ini, seperti minimnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya partisipasi, perbedaan pandangan dan kepentingan, serta keterbatasan sumber daya dan dukungan dari pemerintah (Riyanto, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa tanpa adanya kesadaran dan pemahaman yang memadai, masyarakat tidak akan berkontribusi secara optimal dalam program-program yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Selain itu, Mustamin mencatat bahwa kebijakan pemerintah selama pandemi COVID-19, seperti Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), juga menciptakan tantangan baru bagi masyarakat marginal. Kebijakan ini sering kali diterapkan tanpa mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang terdampak, sehingga memperburuk situasi mereka (Mustamin, 2023). Dalam konteks ini, penting untuk mengembangkan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat marginal agar mereka tidak terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan.

Hambatan lain yang dihadapi dalam implementasi kebijakan sosial adalah kurangnya solidaritas sosial di antara masyarakat. Bormasa menekankan bahwa solidaritas sosial sangat penting dalam mengatasi tantangan lingkungan dan sosial, terutama di daerah rentan bencana. Keterlibatan masyarakat dalam aksi kolektif dan inisiatif berbasis komunitas dapat memperkuat solidaritas ini, namun sering kali kurang didorong oleh kebijakan pemerintah yang ada (Bormasa, 2023). Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk memobilisasi solidaritas sosial melalui program-program yang melibatkan masyarakat secara langsung.

Lebih jauh, Muhsin menggarisbawahi pentingnya peran berbagai pihak dalam mendukung kebijakan sosial, seperti program Perhutanan Sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Namun, konflik antara kepentingan pengelolaan hutan dan kebutuhan masyarakat sering kali menjadi penghalang dalam implementasi kebijakan ini (Muhsin, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan sosial harus mempertimbangkan dinamika lokal dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan agar dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik.

Akhirnya, tantangan dalam implementasi kebijakan sosial juga dapat dilihat dari perspektif ekonomi. Hulaifah mencatat bahwa pembangunan sosial yang berorientasi pada kesejahteraan harus mencakup aspek ekonomi yang adil dan merata (Hulaifah, 2022). Tanpa adanya dukungan ekonomi yang kuat, kebijakan sosial akan sulit untuk mencapai tujuannya. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menciptakan kebijakan yang tidak hanya fokus pada aspek sosial tetapi juga pada penguatan ekonomi masyarakat marginal.

Secara keseluruhan, hambatan implementasi kebijakan sosial di masyarakat marginal merupakan isu kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait. Analisis yang lebih mendalam diperlukan untuk memahami akar permasalahan dan merumuskan solusi yang

tepat. Berdasarkan hasil yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat beberapa poin penting yang perlu dielaborasi lebih lanjut:

1. **Partisipasi Masyarakat:** Minimnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan sosial menjadi hambatan signifikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya informasi dan pemahaman masyarakat tentang program-program kebijakan sosial, rendahnya tingkat pendidikan dan literasi, serta kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah. Selain itu, mekanisme penyampaian aspirasi dan keluhan masyarakat seringkali tidak berjalan efektif, sehingga masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif, serta menyediakan platform yang mudah diakses oleh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan mereka.
2. **Solidaritas Sosial:** Lemahnya solidaritas sosial di antara masyarakat juga menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan sosial. Masyarakat marginal seringkali terfragmentasi dan kurang memiliki rasa kebersamaan, sehingga sulit untuk membangun gerakan kolektif dalam mengadvokasi hak-hak mereka. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya solidaritas sosial antara lain perbedaan etnis, agama, dan kelas sosial. Untuk memperkuat solidaritas sosial, perlu diinisiasi program-program yang mendorong interaksi dan kerjasama antar kelompok masyarakat, serta membangun narasi bersama untuk memperjuangkan kepentingan bersama.
3. **Konflik Kepentingan:** Konflik kepentingan antara berbagai pihak, seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat, juga dapat menghambat implementasi kebijakan sosial. Misalnya, dalam program Perhutanan Sosial, seringkali terjadi konflik antara kepentingan pengelolaan hutan dan kebutuhan masyarakat lokal. Konflik kepentingan ini dapat disebabkan oleh perbedaan tujuan, nilai, dan akses terhadap sumber daya. Untuk mengatasi konflik kepentingan, perlu dibangun mekanisme dialog dan negosiasi yang inklusif, serta menetapkan aturan main yang jelas dan adil bagi semua pihak.
4. **Dukungan Ekonomi:** Keterbatasan dukungan ekonomi menjadi hambatan yang krusial dalam implementasi kebijakan sosial. Program-program kebijakan sosial membutuhkan pendanaan yang memadai untuk dapat berjalan secara efektif. Namun, alokasi anggaran untuk program-program sosial seringkali terbatas, sehingga sulit untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Selain itu, mekanisme penyaluran dana bantuan sosial seringkali tidak efisien dan rentan terhadap korupsi. Untuk meningkatkan dukungan ekonomi, perlu dilakukan optimalisasi alokasi anggaran untuk program-program sosial, serta memperkuat sistem pengawasan untuk mencegah penyelewengan dana.

Dengan menganalisis lebih dalam hambatan-hambatan tersebut, diharapkan dapat dirumuskan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan implementasi kebijakan sosial di masyarakat marginal

2. Strategi Adaptasi Masyarakat Marginal

Strategi adaptasi masyarakat marginal dalam menghadapi berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan sangat penting untuk meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan mereka. Masyarakat marginal sering kali terjebak dalam siklus kemiskinan dan ketidakadilan, sehingga memerlukan pendekatan yang holistik dan inklusif untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah penguatan jaringan sosial dan komunikasi di antara anggota komunitas. Menurut Islam et al., sumber daya seperti jaringan sosial dan infrastruktur komunikasi berperan penting dalam membangun ketahanan komunitas terhadap bencana dan tantangan lainnya (Islam et al., 2022). Dengan memperkuat hubungan antarindividu dalam komunitas, masyarakat marginal dapat saling mendukung dan berbagi sumber daya, yang pada gilirannya meningkatkan kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan perubahan.

Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, organisasi non-pemerintah (NGO), dan masyarakat itu sendiri juga merupakan kunci dalam strategi adaptasi. Elva menekankan pentingnya pendekatan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

Indexed:



tata kelola kolaboratif dalam kebijakan perlindungan sosial, di mana semua pihak terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan (Elva, 2023). Dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program, mereka akan merasa memiliki dan lebih berkomitmen untuk menjalankan kebijakan tersebut. Hal ini juga dapat membantu memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal.

Pentingnya pendidikan dan peningkatan kapasitas juga tidak dapat diabaikan dalam strategi adaptasi masyarakat marginal. Pendidikan yang inklusif dan aksesibel dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing masyarakat di pasar kerja. Molla dan Pham menunjukkan bahwa ketidakadilan pendidikan, termasuk kurangnya akses terhadap pendidikan berkualitas, merupakan faktor signifikan dalam ketidaksetaraan sosial (Molla & Pham, 2019). Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat marginal harus menjadi prioritas dalam strategi adaptasi.

Dalam konteks perubahan iklim dan bencana alam, masyarakat marginal juga perlu mengembangkan strategi mitigasi dan adaptasi yang efektif. Haley et al. menyoroti pentingnya memahami konteks lokal dan tantangan yang dihadapi oleh komunitas dalam merespons perubahan iklim (Haley et al., 2021). Dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang ada, masyarakat dapat merancang intervensi yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Misalnya, pengembangan infrastruktur yang tahan bencana dan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan bertani yang berkelanjutan dapat membantu masyarakat marginal beradaptasi dengan perubahan lingkungan.

Akhirnya, untuk mencapai keberlanjutan dalam strategi adaptasi, penting untuk menciptakan kebijakan yang mendukung inklusi sosial dan ekonomi. Vela-Jiménez menekankan bahwa pengukuran yang tepat terhadap tantangan multidimensional yang dihadapi oleh daerah perkotaan yang terpinggirkan sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang efektif (Vela-Jiménez, 2021). Kebijakan yang mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan masyarakat marginal, seperti akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesempatan kerja, akan lebih berhasil dalam meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan mereka.

Secara keseluruhan, strategi adaptasi masyarakat marginal harus mencakup penguatan jaringan sosial, kolaborasi lintas sektor, peningkatan akses pendidikan, respons terhadap perubahan iklim, dan kebijakan yang mendukung inklusi sosial. Dengan pendekatan yang komprehensif dan partisipatif, masyarakat marginal dapat lebih siap menghadapi tantangan yang ada dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Masyarakat marginal seringkali mengembangkan strategi adaptasi yang inovatif dan efektif dalam menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Analisis lebih dalam terhadap strategi-strategi ini penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mendukung keberhasilan adaptasi dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang tepat.

- Penguatan Jaringan Sosial:** Strategi ini menjadi krusial bagi masyarakat marginal karena memungkinkan mereka untuk saling berbagi sumber daya, informasi, dan dukungan. Jaringan sosial yang kuat dapat berfungsi sebagai sistem perlindungan sosial informal yang membantu masyarakat marginal mengatasi kesulitan ekonomi, mendapatkan akses ke layanan kesehatan, dan menghadapi bencana alam. Namun, efektivitas strategi ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tingkat kepercayaan antaranggota masyarakat, keragaman sosial, dan keberadaan kepemimpinan lokal yang kuat.
- Kolaborasi Lintas Sektor:** Kolaborasi antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat merupakan faktor penting dalam keberhasilan strategi adaptasi. Kolaborasi ini dapat memfasilitasi akses masyarakat marginal terhadap sumber daya dan layanan, memperkuat kapasitas lokal, dan meningkatkan koordinasi program-program pembangunan. Namun, hambatan seperti birokrasi yang rumit, kurangnya koordinasi, dan perbedaan kepentingan antar pihak dapat menghambat efektivitas kolaborasi.
- Pendidikan dan Peningkatan Kapasitas:** Investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan merupakan strategi jangka panjang yang penting untuk meningkatkan daya

saing masyarakat marginal di pasar kerja dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kemiskinan. Program-program pendidikan dan pelatihan harus relevan dengan kebutuhan pasar kerja lokal dan mempertimbangkan konteks sosial budaya masyarakat marginal. Selain itu, akses terhadap pendidikan berkualitas harus dijamin bagi semua anggota masyarakat, termasuk perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas.

4. **Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim:** Masyarakat marginal seringkali berada di garis depan dampak perubahan iklim, seperti bencana alam, kekeringan, dan kenaikan permukaan air laut. Oleh karena itu, strategi adaptasi harus mencakup upaya-upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, seperti pengembangan infrastruktur yang tahan bencana, diversifikasi mata pencaharian, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Pengetahuan lokal dan kearifan tradisional dapat diintegrasikan dalam strategi adaptasi untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan.
5. **Kebijakan Inklusif:** Kebijakan pemerintah yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat marginal merupakan faktor penting dalam keberhasilan strategi adaptasi. Kebijakan tersebut harus diarahkan pada pengurangan kesenjangan sosial dan ekonomi, peningkatan akses terhadap layanan dasar, dan pemberdayaan masyarakat marginal. Evaluasi dan monitoring kebijakan secara berkala penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut efektif dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan

3. Rekomendasi Kebijakan

Menerapkan Rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat marginal di Indonesia perlu mempertimbangkan berbagai aspek yang dapat memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi mereka. Berdasarkan analisis dari beberapa penelitian, berikut adalah beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan.

1. Pertama, penting untuk meningkatkan modal sosial masyarakat melalui penguatan jaringan komunitas dan kolaborasi dengan pihak luar. Wirmas dan Pramono menunjukkan bahwa peningkatan modal sosial dapat membantu masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang lebih mandiri dan partisipatif Wirmas & Pramono (2021). Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga terkait perlu mengembangkan program yang mendorong kerjasama antar komunitas dan dengan organisasi non-pemerintah, sehingga masyarakat dapat saling mendukung dalam pengembangan kapasitas dan sumber daya.
2. Kedua, dalam konteks ketahanan pangan, Hulu merekomendasikan penataan jangka panjang untuk mencapai swasembada kedelai, termasuk perluasan areal tanam dan peningkatan produksi melalui subsidi dan regulasi yang adil (Hulu, 2023). Kebijakan ini tidak hanya akan meningkatkan ketersediaan pangan tetapi juga memberikan peluang kerja bagi masyarakat marginal yang terlibat dalam sektor pertanian.
3. Ketiga, pendidikan dan pelatihan keterampilan harus menjadi fokus utama dalam kebijakan sosial. Dwinugraha menekankan pentingnya model pembelajaran yang adaptif pasca-pandemi COVID-19 untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah-daerah yang kurang beruntung (Dwinugraha, 2023). Program pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja dapat membantu masyarakat marginal untuk meningkatkan daya saing mereka.
4. Keempat, dalam menghadapi perubahan iklim, penting untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung adaptasi masyarakat. Choirunnisa et al. menunjukkan bahwa nelayan pesisir dapat beradaptasi dengan perubahan iklim melalui strategi yang terintegrasi (Choirunnisa et al., 2022). Oleh karena itu, pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang mendukung penelitian dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan serta memberikan pelatihan bagi masyarakat tentang cara beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang berubah.
5. Kelima, untuk meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial, perlu dilakukan evaluasi dan penyesuaian kebijakan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Najwa menyoroti pentingnya analisis efektivitas program perlindungan sosial dalam meningkatkan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com / admin@lkispol.or.id

Indexed:



kesejahteraan kelompok rentan (Najwa, 2024). Oleh karena itu, pemerintah harus melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi dan perumusan kebijakan agar program yang ada benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka. Akhirnya, penguatan infrastruktur juga menjadi aspek penting dalam rekomendasi kebijakan. Sapuan menyatakan bahwa program percepatan infrastruktur dapat membantu mengurangi pengangguran dan meningkatkan aksesibilitas layanan bagi masyarakat marginal (Sapuan, 2024). Oleh karena itu, investasi dalam pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan harus menjadi prioritas dalam agenda pembangunan nasional.

Secara keseluruhan, rekomendasi kebijakan untuk masyarakat marginal harus mencakup peningkatan modal sosial, ketahanan pangan, pendidikan, adaptasi terhadap perubahan iklim, evaluasi program perlindungan sosial, dan penguatan infrastruktur. Dengan pendekatan yang komprehensif dan partisipatif, diharapkan masyarakat marginal dapat lebih berdaya dan sejahtera..

KESIMPULAN

Studi literatur ini telah mengkaji implementasi kebijakan sosial di masyarakat marginal, hambatan yang dihadapi, dan strategi adaptasi yang mereka terapkan. Hasil analisis menunjukkan bahwa masyarakat marginal menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses dan memanfaatkan program-program kebijakan sosial, antara lain hambatan struktural seperti aksesibilitas geografis yang terbatas, kurangnya infrastruktur, dan birokrasi yang rumit; hambatan kultural seperti stigma sosial, diskriminasi, dan kurangnya pemahaman tentang program kebijakan sosial; serta hambatan individual seperti tingkat pendidikan yang rendah, keterbatasan ekonomi, dan disabilitas. Di sisi lain, masyarakat marginal juga menunjukkan kemampuan adaptasi yang luar biasa dalam menghadapi hambatan tersebut. Mereka mengembangkan berbagai strategi, baik secara individual maupun kolektif, untuk memenuhi kebutuhan mereka dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Strategi-strategi tersebut meliputi penguatan jaringan sosial, kolaborasi lintas sektor, pendidikan dan peningkatan kapasitas, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta advokasi kebijakan. Temuan studi ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang komprehensif dan partisipatif dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan sosial untuk masyarakat marginal. Kebijakan yang efektif harus mempertimbangkan konteks lokal, kebutuhan spesifik masyarakat marginal, serta melibatkan mereka secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, perlu adanya sinergi dan koordinasi yang kuat antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk memastikan bahwa program-program kebijakan sosial dapat menjangkau dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat marginal. Peningkatan akses terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan, dan layanan dasar, serta penguatan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi, merupakan langkah-langkah penting untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kerentanan masyarakat marginal. Studi ini juga merekomendasikan perlunya evaluasi dan monitoring kebijakan secara berkala untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

REFERENSI

- Asror, M. (2021). Studi Analisis Program Bimbingan Konseling Komprehensif Berbasis Islam Untuk Meningkatkan Resiliensi Siswa. In Pamomong Journal of Islamic Educational Counseling (Vol. 1, Issue 1, p. 1). IAIN Salatiga. <https://doi.org/10.18326/pamomong.v1i1.1-13>
- Bagus, N. (2019). HUBUNGAN ANTARA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN KEMAMPUAN USAHA MASYARAKAT. In REFORMASI (Vol. 9, Issue 2, p. 174). <https://doi.org/10.33366/rfr.v9i2.1542>
- Bormasa, M. (2023). Menggalang solidaritas sosial: pengaruh kepedulian sosial dalam mengatasi tantangan lingkungan di daerah rentan bencana (studi di kabupaten cianjur). Jurnal Pengabdian West Science, 2(6), 477-489. <https://doi.org/10.58812/jpws.v2i6.453>
- Choirunnisa, L., Purwaningsih, Y., & Prasetyani, D. (2022). Adaptasi nelayan pesisir kabupaten pacitan akibat perubahan iklim. Jurnal Wilayah Dan Lingkungan, 10(2), 166-181. <https://doi.org/10.14710/jwl.10.2.166-181>

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

Indexed:



GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 11 Nomor 2 Desember 2024

- Dwinugraha, A. (2023). Rekomendasi kebijakan model pembelajaran pendidikan di kabupaten malang. *Jurnal Ilmiah Tata Sejuta Stia Mataram*, 9(1), 209-217. <https://doi.org/10.32666/tatasejuta.v9i1.506>
- Elva, S. (2023). Collaborative governance for social protection policy in karimun regency. *Jurnal Syntax Admiration*, 4(9), 1331-1341. <https://doi.org/10.46799/jsa.v4i9.718>
- Haley, J., Heeks, R., & Belle, J. (2021). Measuring resilience in marginalised urban communities: a south african township pilot study. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3821218>
- Handayani, L., & Aliyudin, A. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Keluarga Harapan (PKH). In *Tamkin Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* (Vol. 5, Issue 1). <https://doi.org/10.15575/tamkin.v5i1.24164>
- Hulaifah (2022). Memposisikan pembangunan sosial sebagai mainstream penyelenggaraan pemerintahan di indonesia. *JISMA: J. Ilmu Sos. Manajemen, dan Akunt.*, 1(4), 627-638. <https://doi.org/10.59004/jisma.v1i4.209>
- Hulu, A. (2023). Studi inovasi strategi kebijakan percepatan pencapaian swasembada kedelai indonesia tahun 2035. *Matra Pembaruan*, 7(1), 13-23. <https://doi.org/10.21787/mp.7.1.2023.13-23>
- Islam, M., Chisty, M., Fuad, A., Rahman, M., Muhtasim, M., Dola, S., ... & Khan, N. (2022). Using arc-d toolkit for measuring community resilience to disasters. *Sustainability*, 14(3), 1758. <https://doi.org/10.3390/su14031758>
- Molla, T. and Phạm, L. (2019). Editorial: capital, capability and educational justice. *Policy Futures in Education*, 17(5), 575-581. <https://doi.org/10.1177/1478210319837835>
- Muhdin (2019). Peran para pihak dalam mendukung percepatan perhutanan sosial. *Policy Brief Pertanian Kelautan Dan Biosains Tropika*, 1(1), 17-19. <https://doi.org/10.29244/agromaritim.0101.17-19>
- Mustamin, M. (2023). Kepercayaan sosial online di pemerintah (analisis kebijakan pemerintah selama pandemi covid-19). *Journal Social Society*, 3(1), 32-38. <https://doi.org/10.54065/jss.3.1.2023.343>
- Najwa, Y. (2024). Analisis efektivitas program perlindungan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan di indonesia. *itimad*, 2(1), 1-20. <https://doi.org/10.35878/alitimad.v2i1.1131>
- Ndaumanu, F. (2020). Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah. In *Jurnal HAM* (Vol. 11, Issue 1, p. 131). <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.131-150>
- Riyanto, M. (2023). Partisipasi masyarakat menuju negara kesejahteraan: memahami pentingnya peran aktif masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(2), 374-388. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.374-388>
- Sapuan, M. (2024). Implementasi kebijakan publik program percepatan infrastruktur kelurahan (pik). *Jurnal Pengabdian Ibnu Sina*, 3(2), 153-162. <https://doi.org/10.36352/j-pis.v3i2.862>
- Vela-Jiménez, R. (2021). Do current measures of social exclusion depict the multidimensional challenges of marginalized urban areas? insights, gaps and future research. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(15), 7993. <https://doi.org/10.3390/ijerph18157993>
- Wijayanti, I., Hartati, D., & Adham, M. J. I. (2022). Masalah Sosial Dalam Kumpulan Cerpen Riwayat Negeri Yang Haru Cerpen Kompas Pilihan 1980-1990. In *Jurnal Pendidikan Tambusai* (Vol. 6, Issue 3, p. 13616). Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i3.4483>
- Wirmas, M. and Pramono, R. (2021). Untitled. *Jurnal Pembangunan Nagari*, 6(2), 130. <https://doi.org/10.30559/jpn.v6i2.254>

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com / admin@lkispol.or.id

Indexed:

